

PENCAPAIAN INDIKATOR IKKT PADA PENYELENGGARAAN SMK RSBI DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Amat Jaedun

(Dosen Jurdiknik Sipil dan Perencanaan FT UNY)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: (1) memperoleh gambaran umum mengenai penyelenggaraan pendidikan pada dan (2) mengidentifikasi kendala-kendala yang dialami SMK RSBI di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengimplementasikan program pendidikan.

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang dilakukan pada enam SMK Negeri RSBI. Disain evaluasi yang diacu adalah discrepancy model. Pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara. Uji validitas instrumen didasarkan pada validitas isi, yang dilakukan melalui rational judgment. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan pendidikan pada SMK RSBI di DIY belum sesuai dengan standar penyelenggaraan SMK RSBI yang telah ditetapkan. Kelemahan terutama dalam pemenuhan indikator kinerja kunci tambahan (IKKT), yang meliputi semua aspek. Kendala yang dialami oleh SMK RSBI antara lain: (a) belum diperolehnya akreditasi dari sekolah mitra yang bertaraf internasional; (b) sekolah belum mampu membangun jejaring internasional; (c) SKL tambahan yang disusun belum memiliki acuan yang jelas; (d) proses pembelajaran belum sesuai dengan standar RSBI; (e) sekolah belum menerapkan model penilaian dari salah satu sekolah yang bertaraf internasional; (f) persentase pendidik yang berkualifikasi S2/S3 sangat rendah; (g) sebagian besar kepala sekolah belum berkualifikasi S2, dan kurang menguasai bahasa Inggris secara aktif; (h) belum diterapkannya TIK dalam manajemen sekolah; (i) keterbatasan sarana dan prasarana

sesuai dengan standar RSBI; dan (j) ketersediaan dana penyelenggaraan pendidikan yang kurang memadai serta dukungan pemerintah daerah yang lemah.

Kata Kunci : SMK RSBI

Pendahuluan

Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) merupakan amanat undang-undang, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50, ayat (3), yang menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan, juga ditegaskan kembali perlunya sekolah bertaraf internasional serta pasal 61, ayat (1) menyatakan bahwa pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Penyelenggaraan SBI secara formal dimulai pada tahun 2007. Namun demikian, penyelenggaraan pendidikan sebagai rintisan SBI sebenarnya telah dimulai beberapa tahun sebelumnya, dengan nama

dan orientasi pada setiap jenjang yang bervariasi. Pada tingkat TK dan SD, sejak tahun 2003 Direktorat Pembinaan TK dan SD telah merintis pengembangan TK dan SD Model, yang sampai saat ini telah dibangun pada 26 kabupaten/kota di Indonesia. Pada tingkat SMA, sejak lama telah diselenggarakan model kelas internasional. Sedangkan pada jenjang SMP, sejak beberapa tahun yang lalu juga telah merintis calon SBI dengan nama kelas bilingual atau imersi. Sementara itu, bagi SMK penyelenggaraan sekolah RSBI tersebut merupakan program yang baru, karena sebelumnya SMK belum pernah melakukan rintisan SBI.

Berdasarkan berbagai program dan orientasi rintisan SBI tersebut, maka Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2006 mencanangkan penyelenggaraan SBI dengan nama yang satu yaitu Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Namun demikian, pada awal penyelenggaraannya di tahun 2007 dan 2008 dinamai dengan Rintisan SBI .

Ada beberapa strategi pokok dalam penyelenggaraan rintisan SBI, baik yang berkaitan dengan peningkatan mutu *input*, proses maupun *output* . Strategi yang berkaitan dengan peningkatan mutu *input*, antara lain diimplementasikan dalam penyiapan *input* yang memadai untuk dapat menyelenggarakan pendidikan yang bertaraf internasional, baik seleksi *raw input*, penyiapan instrumental *input* maupun penyiapan *input* manajemen yang bertaraf internasional.

Beberapa strategi pokok yang berkaitan dengan aspek proses antara lain: (1) adanya upaya peningkatan kualitas pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris dan TIK; (2) pembelajaran dengan menggunakan pengantar bahasa Inggris, khususnya untuk mata pelajaran matematika, IPA, bahasa Inggris dan TIK; dan (3) pembelajaran yang berbasis TIK. Sementara itu, beberapa strategi peningkatan mutu *output* diarahkan untuk menghasilkan *output* yang memenuhi standar nasional, sekaligus bertaraf internasional, yang antara lain didasarkan: (1) kualitas lulusan berdasarkan kurikulum nasional; (2) kompetensi lulusan dalam bahasa Inggris; (3) kemampuan lulusan yang berkaitan dengan TIK; dan (4) pengakuan lulusan oleh dunia kerja atau lembaga pendidikan di luar negeri.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan RSBI di SMP yang dilakukan oleh Amat Jaedun (2009), menunjukkan bahwa sebagian besar sekolah (SMP), sebenarnya belum cukup siap untuk mengimplementasikan program pendidikan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Namun, demi alasan tertentu seperti: untuk meraih *block grant* peningkatan mutu, prestise atau alasan lain, maka sekolah-sekolah tersebut cenderung memaksakan diri untuk menjadi sekolah RSBI meskipun terkesan hanya asal jalan. Demikian pula, hasil penelitian Ali Akbar (2009), menunjukkan bahwa sebagian besar SMK di Yogyakarta adalah belum cukup siap untuk

menyelenggarakan program pendidikan sesuai standar RSBI. Ketidaksiapan sekolah untuk mengimplementasikan program sebagai RSBI tersebut terutama disebabkan oleh ketidaksiapan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain yang dimiliki sekolah untuk menyelenggarakan proses pendidikan sesuai standar RSBI.

Sesuai dengan gambaran di atas, dapat dinyatakan bahwa meskipun realitanya saat ini beberapa sekolah (SMK) telah mengimplementasikan program pendidikan sebagai RSBI, namun faktanya bahwa masing-masing sekolah tersebut memiliki kesiapan yang cukup variatif untuk dapat mengimplementasikan program pendidikan sesuai standar RSBI. Oleh karena itu, penelitian mengenai potret penyelenggaraan program pendidikan di SMK RSBI Yogyakarta menjadi sangat penting dilakukan, terutama untuk mengetahui kesiapan sumber daya manusia dan sumber daya yang lain di SMK untuk dapat mengimplementasikan program pendidikan sesuai standar RSBI.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitiannya sebagai berikut; (1) bagaimanakah gambaran umum mengenai penyelenggaraan pendidikan pada SMK RSBI di Daerah Istimewa Yogyakarta?, dan (2) apa saja kendala-kendala yang dialami oleh SMK rintisan SBI di Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut dalam pelaksanaan program pendidikan sesuai standar RSBI?

Terminologi sekolah bertaraf internasional pada awalnya ditemui dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pasal 50, ayat (3). Kata bertaraf internasional di sini memiliki arti bahwa sekolah tersebut setingkat dengan sekolah-sekolah sejenis di negara-negara lain, khususnya negara maju. Kata setingkat atau memiliki *level* yang sama ini dapat merujuk pada *input*, proses, dan *outputnya* dengan sekolah sejenis di negara maju (<http://www.puslitjaknov.org/data/file/2008>).

Menurut Depdiknas (2006:3), SBI adalah sekolah nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan standar nasional pendidikan (SNP) Indonesia dan sekaligus bertaraf internasional, sehingga lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional. Dengan pengertian ini, SBI dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\mathbf{SBI = SNP + X (OECD)}$$

Dalam hal ini,

- **SNP** adalah standar nasional pendidikan (SNP) yang meliputi: kompetensi lulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, penilaian, dan pembiayaan.
- **X** merupakan penguatan, pengayaan, pengembangan, perluasan, pendalaman melalui adaptasi atau adopsi terhadap standar pendidikan, baik dari dalam maupun luar negeri yang diyakini telah memiliki reputasi mutu yang diakui

secara internasional.

Sementara itu, dalam “Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2007”, dinyatakan bahwa sekolah/madrasah internasional adalah sekolah/ madrasah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan, sehingga memiliki daya saing internasional (Kir Haryana, 2007).

Karakteristik esensial dari SBI dalam indikator kunci minimal (SNP) dan indikator kunci tambahan (X) sebagai jaminan mutu pendidikan bertaraf internasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Karakteristik Esensial SBI sebagai Penjaminan Mutu Pendidikan Bertaraf Internasional

No	Obyek Penjaminan Mutu	Indikator Kinerja Kunci Minimal (dalam SNP)	Indikator Kinerja Kunci Tambahan sebagai (X-nya)
I	Akreditasi	Berakreditasi A dari BAN Sekolah dan Madrasah	Berakreditasi tambahan dari badan akreditasi sekolah pada salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggul-an tertentu dalam bidang pendidikan

berlanjut...

lanjutan...

II	Kurikulum (Standar Isi) dan Standar Kompetensi Lulusan	Menerapkan KTSP	Sekolah telah menerapkan sistem administrasi akademik berbasis TIK, dimana setiap siswa dapat mengakses transkripnya masing-masing.
		Memenuhi Standar Isi	Muatan pelajaran dalam kurikulum telah setara atau lebih tinggi dari muatan pelajaran yang sama pada sekolah unggul dari salah satu Negara anggota OECD dan/atau dari Negara maju lainnya.
		Memenuhi SKL	Penerapan standar kelulusan yang setara atau lebih tinggi dari SNP Meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetensi sains, matematika, teknologi, seni, dan olah raga.
III	Proses Pembelajaran	Memenuhi Standar Proses	<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembelajaran pada semua mata pelajaran telah menjadi rujukan bagi sekolah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa kewirausahaan, jiwa patriot, dan jiwa Kenegaraan
			<ul style="list-style-type: none"> • Proses pembelajaran telah diperkaya dengan model-model pembelajaran sekolah unggul dari salah satu Negara anggota OECD dan/atau Negara maju lainnya. • Penerapan proses pembelajaran ber-basis TIK pada semua mata pelajaran. • Pembelajaran pada mata pelajaran IPA, Matematika, dan lainnya dengan bahasa Inggris, kecuali mata pelajaran bahasa Indonesia.

berlanjut...

lanjutan...

IV	Penilaian	Memenuhi Standar Penilaian	Sistem/model penilaian telah diperkaya dengan model penilaian dari sekolah unggul di salah satu Negara anggota OECD dan/atau Negara maju lainnya.
V	Pendidik	Memenuhi Standar Pendidik	<ul style="list-style-type: none"> • Guru sains, matematika, dan TIK mampu mengajar dengan bahasa Inggris • Semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK • Minimal 30% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A
VI	Tenaga Kependidikan	Memenuhi Standar Tenaga Kependidikan	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala sekolah berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya terakreditasi A • Kepala sekolah telah menempuh pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh Pemerintah • Kepala sekolah mampu berbahasa Inggris secara aktif • Kepala sekolah memiliki visi internasional, mampu membangun jejaring internasional, memiliki kompetensi manajerial, serta jiwa kepemimpinan dan enter-prenual yang kuat.
VII	Sarana Prasarana	Memenuhi Standar Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap ruang kelas dilengkapi sarana pembelajaran berbasis TIK. • Sarana perpustakaan TELAH dilengkapi dengan sarana yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia

berlanjut...

lanjutan...

			<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah memiliki dengan ruang multi media, ruang unjuk seni budaya, fasilitas olah raga, klinik, dan lain-lain.
VIII	Pengelolaan	Memenuhi Standar Pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Sekolah telah meraih sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya (2001, dst) dan ISO 14000 • Merupakan sekolah multi kultural • Sekolah telah menjalin hubungan dengan "sister school" dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri • Sekolah terbebas dari rokok, narkoba, kekerasan, kriminal, pelecehan seksual, dan lain-lain • Sekolah menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam semua aspek pengelolaan sekolah
IX	Pembiayaan	Memenuhi Standar Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan model pembiayaan yang efisien untuk mencapai berbagai target indikator kunci tambahan

Sumber: Depdiknas (2006), Kir Haryana (2007), dan Joko Sutrisno (2007).

Karakteristik SBI sebagaimana dijelaskan di atas merupakan karakteristik SBI untuk sekolah-sekolah non kejuruan, seperti: SD, SMP maupun SMA. Sementara itu, bagi SMK RSBI selain harus memiliki karakteristik di atas masih ditambah dengan karakteristik yang khusus sesuai bidang kejuruan yang diajarkan, yaitu: (1) SMK tersebut mengembangkan *teaching factory*; dan (2) SMK tersebut tersebut mengimplementasikan *self access study* atau program SAS

(Djemari Mardapi, 2007).

Teaching factory adalah suatu konsep pembelajaran dalam suasana yang sesungguhnya, sehingga diharapkan dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara yang dibekalkan di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja (<http://www.smk1kedungwuni.sch.id>). Dalam pengertian lain, *teaching factory* merupakan pembelajaran berbasis produksi yaitu suatu proses pembelajaran keahlian atau ketrampilan yang dirancang dan dilaksanakan berdasarkan prosedur dan standar kerja yang sesungguhnya (*the real job*) untuk menghasilkan barang atau jasa yang sesuai dengan tuntutan pasar atau konsumen (<http://www.disdik.jambiprov.go.id/informasi/lembaga-pendidikan/107.html>). Dengan kata lain barang yang diproduksi harus berupa hasil produksi yang dapat dijual atau yang dapat digunakan oleh masyarakat, sekolah atau konsumen.

Sementara itu, *Self Access Study* (SAS) merupakan program atau kegiatan belajar secara mandiri melalui pembelajaran berbasis TIK (<http://www.seamolec.org/pages.php?>). Ide awal dari SAS adalah untuk menciptakan lingkungan pembelajaran secara mandiri yang dapat diakses baik oleh siswa maupun elemen sekolah yang lain. Dengan adanya SAS ini diharapkan siswa dan guru akan dapat belajar menggunakan media berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti intranet maupun internet. Pembelajaran SAS

ini terutama banyak diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris secara mandiri, dengan memanfaatkan lingkungan pembelajaran yang telah disetting secara khusus.

Berdasarkan karakteristik SMK RSBI sebagaimana diuraikan di atas, maka potret penyelenggaraan SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dapat dinilai berdasarkan tingkat pemenuhan sekolah terhadap indikator kinerja kunci minimal (IKKM) yaitu 8 (delapan) standar nasional pendidikan, ditambah kemampuan sekolah untuk memenuhi indikator kinerja kunci tambahan (IKKT), yang mencerminkan ciri keinternasionalan. Atau dengan kata lain, potret penyelenggaraan SMK RSBI dapat dinilai berdasarkan kemampuan SMK untuk memenuhi 8 Standar Nasional Pendidikan, yang meliputi: (1) standar isi (SI); (2) standar kompetensi lulusan (SKL); (3) standar proses; (4) standar penilaian; (5) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (6) standar sarana dan prasarana; (7) standar pengelolaan; dan (8) standar pembiayaan. Selain itu, SMK RSBI harus pula memenuhi indikator kinerja kunci tambahan (IKKT), yang merupakan ciri keinternasionalan, yang meliputi 10 indikator sebagaimana disebutkan di atas.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi (*evaluation research*) yang dilakukan melalui studi kasus pada enam SMK negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang saat ini menyelenggarakan

program pendidikan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI). Sumber data (responden) penelitian ini adalah para penanggung jawab atau ketua pokja program RSBI di SMK yang bersangkutan.

Disain evaluasi yang diacu adalah model kesenjangan atau *Discrepancy model*, yang dikembangkan oleh Malcolm Provus (Suharsimi Arikunto, 2009: 48). Model ini merupakan model yang menekankan pada analisis kesenjangan dalam implementasi program, yaitu kesenjangan antara kondisi yang seharusnya menurut ketentuan yang telah ditetapkan (yang dalam hal ini adalah karakteristik SMK RSBI) dengan kondisi riil penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing SMK yang menjadi obyek penelitian.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode angket, dan wawancara tak terstruktur. Angket (kuesioner), merupakan metode pengumpulan data yang pokok, yang dimaksudkan untuk memperoleh data mengenai gambaran umum penyelenggaraan program pendidikan pada SMK RSBI di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan: (1) status akreditasi sekolah; (2) kurikulum, yang meliputi standar isi (SI) dan standar kompetensi lulusan (SKL); (3) proses pembelajaran; (4) pelaksanaan penilaian; (5) kesiapan sumber daya manusia pendidik; (6) kesiapan tenaga kependidikan; (7) kesiapan sarana dan prasarana; (8) pelaksanaan pengelolaan atau manajemen sekolah; (9) kesiapan

aspek pendanaan; (10) penyelenggaraan *teaching factory* di SMK; dan (11) kesiapan SMK untuk mengimplementasikan program *self access study* (SAS). Dalam hal ini, sebagai responden adalah penanggung jawab atau ketua pokja program RSBI di SMK yang bersangkutan. Sementara itu, wawancara tak terstruktur juga dilakukan kepada ketua pokja RSBI untuk melakukan konfirmasi (validasi) dan pendalaman terhadap data yang diperoleh melalui angket.

Instrumen yang digunakan adalah berupa angket (kuesioner), dalam bentuk angket tertutup (*fixed-response*) dan angket terbuka. Uji validitas instrumen (angket) dilakukan terhadap validitas isi, yang didasarkan pada pertimbangan logis, yaitu melalui *expert judgment*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, baik kuantitatif maupun kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Potret penyelenggaraan atau kesiapan SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dapat dinilai berdasarkan tingkat pemenuhan sekolah terhadap indikator kinerja kunci minimal (IKKM) yaitu 8 (delapan) standar nasional pendidikan, ditambah kemampuan sekolah untuk memenuhi indikator kinerja kunci tambahan (IKKT), yang mencerminkan ciri keinternasionalan, yang meliputi 10 indikator.

Hasil studi kasus yang dilakukan pada 6 (enam) SMK RSBI di Daerah Istimewa Yogyakarta, menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan program pendidikan pada SMK RSBI di Daerah Istimewa Yogyakarta jika dikaitkan dengan standar RSBI adalah masih jauh dari yang diharapkan. Kelemahan-kelemahan yang masih dijumpai terutama terkait dengan pemenuhan indikator kinerja kunci tambahan (IKKT) yang mencerminkan ciri keinternasionalan, yang meliputi semua aspek, baik kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, kesiapan pendidik, kesiapan kepala sekolah, manajemen sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, pembiayaan, penyelenggaraan *teaching factory*, dan *self access study (SAS)*.

Adapun kelemahan-kelemahan yang masih ditemui terkait dengan pemenuhan indikator IKKT tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Semua SMK sampel belum memiliki sekolah mitra atau *sister school* di luar negeri. Atau dengan kata lain, semua SMK sampel belum membangun jejaring internasional. Hasil wawancara dengan Ketua Pokja RSBI di SMKN 1 Bantul menyatakan bahwa pada saat ini SMKN 1 Bantul sedang merencanakan untuk membangun jejaring dengan sekolah mitra dari Thailand, namun tahapnya masih penjajagan. Akibat dari kondisi ini adalah bahwa dalam penyusunan SKL tambahan yang memiliki ciri keinternasionalan, maka semua SMK RSBI tersebut belum memiliki acuan yang jelas. Selain itu, dengan belum adanya sekolah mitra atau

"*sister school*", maka kurikulum sekolah juga belum dapat diakreditasi oleh sekolah mitra yang bertaraf internasional.

- b. Dalam proses pembelajaran, rata-rata kurang dari 25% guru IPA, matematika, TIK dan inti kejuruan yang mampu melaksanakan pembelajaran dengan pengantar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Namun sebaliknya, sebagian besar (lebih dari 80%) dari guru-guru mata diklat tersebut yang mampu menyelenggarakan pembelajaran yang berbasis TIK, meskipun masih terbatas pada penggunaan *power point*. Terkait dengan sedikitnya guru IPA, matematika, TIK dan inti kejuruan yang mampu menggunakan pengantar bahasa Inggris dalam pembelajaran, maka untuk saat ini kendala tersebut sudah bukan menjadi masalah serius. Menurut para ketua pokja RSBI, saat ini telah ada kebijakan baru yang menyatakan bahwa penggunaan pengantar bahasa Inggris dalam pembelajaran mata pelajaran-mata pelajaran tersebut tidaklah wajib. Menurutnya, kebijakan ini ditempuh dengan beberapa pertimbangan, antara lain: (1) sebagian besar guru belum mampu menggunakan pengantar bahasa Inggris secara baik, sehingga justru akan dapat mengurangi kejelasan penyampaian materi oleh guru; (2) dalam penanaman konsep guru diperbolehkan/dianjurkan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa, termasuk anjuran untuk menggunakan bahasa Indonesia; (3) kemampuan siswa

untuk memahami materi yang disampaikan dalam bahasa Inggris masih lemah, sehingga penggunaan pengantar bahasa Inggris justru dapat menghambat siswa dalam penyerapan materi ajar. Adapun kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggris bagi peserta didik adalah: (a) dalam memberikan tugas-tugas atau soal-soal ujian, guru diwajibkan menuliskannya ke dalam bahasa Inggris atau dwi-bahasa; (b) sekolah dianjurkan menambah jumlah jam mata pelajaran bahasa Inggris, dan melaksanakan pembelajaran bahasa Inggris secara intensif; (c) sekolah dianjurkan untuk mengembangkan program SAS untuk mendukung pembelajaran bahasa Inggris secara mandiri; dan (d) sekolah dianjurkan membuat program/kegiatan pembiasaan penggunaan bahasa Inggris di sekolah, seperti: *English Club, English day* dan sebagainya.

- c. Dalam proses penilaian, pemberian tugas-tugas maupun penyusunan soal-soal tes untuk mata pelajaran IPA, matematika, TIK dan inti kejuruan, semuanya telah disusun dalam bahasa Inggris. Namun demikian, menurut para ketua pokja RSBI sifat dari soal-soal yang disusun tersebut masih cenderung hanya berupa terjemahan soal-soal dalam bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Demikian pula, menurut para ketua pokja soal-soal yang telah disusun oleh guru tersebut belum mengacu pada

model penilaian yang diterapkan di salah satu sekolah dari negara-negara anggota OECD atau negara maju lainnya.

- d. Dari aspek kesiapan pendidik, maka semua SMK sampel belum satupun yang dapat memenuhi standar RSBI, yaitu bahwa kualifikasi guru yang berpendidikan S2/S3 pada semua SMK sampel jauh di bawah 30%, yaitu rata-rata kurang dari 10% atau bahkan ada dua SMK yang kurang dari 5%. Kelemahan ini nampaknya akan sulit diatasi oleh sekolah karena untuk mengatasi masalah ini sekolah akan terkendala oleh ketersediaan dana yang kurang memadai. Selain itu, beban ini akan makin berat mengingat bahwa sekolah juga memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemampuan guru dalam bahasa Inggris dan TIK.
- e. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar kepala SMK sampel belum berpendidikan S2. Hanya di SMKN 2 Wonosari yang telah berkualifikasi S2. Selain memiliki kualifikasi akademik yang belum memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah SMK RSBI, maka ternyata baru sebagian kecil kepala SMK yang mampu berbahasa Inggris secara aktif. Akibat kemampuan bahasa Inggris yang kurang tersebut, maka semua kepala SMK belum membangun jejaring internasional.
- f. Ruang-ruang kelas pada sebagian besar SMK RSBI telah dilengkapi dengan sarana pembelajaran TIK, meskipun pada beberapa SMK sampel sarana TIK belum tersedia di semua ruang

pembelajaran. Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan sarana dan prasarana pendidikan adalah permasalahan klasik, yang seakan tak pernah ada penyelesaiannya, yaitu: (1) Keterbatasan dana untuk pengembangan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan RSBI; (2) Kurangnya dana untuk pengadaan alat-alat baru maupun dana untuk keperluan perawatan/perbaikan alat-alat lama; dan (3) kurangnya dukungan pemerintah daerah dan Pemkab yang belum memiliki kebijakan yang jelas berkaitan dengan penggalangan dana masyarakat untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

- g. Semua SMK RSBI telah meraih sertifikat ISO 9001:2000 atau sesudahnya. Namun, hanya dua SMK, yaitu SMKN 1 Bantul dan SMKN 2 Wonosari, yang telah menerapkan TIK dalam manajemen sekolah, meskipun penerapan TIK tersebut masih terbatas pada administrasi akademik. Selain itu, semua SMK RSBI di D.I. Yogyakarta ternyata belum memiliki sekolah mitra atau *sister school* dari luar negeri. Hal ini terutama diakibatkan kendala bahasa, sehingga belum mampu membangun jejaring internasional.
- h. Semua SMK RSBI mengalami permasalahan dalam hal pembiayaan. Sampai saat ini, sebagian besar biaya penyelenggaraan SMK RSBI berasal dari pemerintah pusat dalam bentuk *block grant* atau hibah investasi, sedangkan dukungan

pembiayaan dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota masih sangat kurang. Selain kurangnya dukungan pendanaan dalam penyelenggaraan RSBI, banyak kebijakan pemerintah daerah yang justru tidak mendukung terhadap penyelenggaraan RSBI, seperti misalnya: penetapan standar dalam penyusunan RAPBS, yang tidak membedakan antara sekolah RSBI dengan program reguler, dan kebijakan pemkab/pemkot yang tidak jelas dalam hal penggalangan dana masyarakat.

- i. Penyelenggaraan *teaching factory* di semua SMK RSBI belum berjalan dengan baik. Hasil survei menunjukkan bahwa di semua sekolah sampel telah menyelenggarakan *teaching factory*, yang dikembangkan dari Unit Produksi yang telah ada di masing-masing sekolah. Namun, pengelolaan kegiatan *teaching factory* tersebut belum dikelola secara profesional.
- j. Penyelenggaraan kegiatan *Self Access Study (SAS)* di semua sekolah sampel belum berjalan dengan baik. Sebagian besar SMK sampel masih pada tahap penyiapan sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan SAS. Namun, sebagian SMK yang lain justru belum merencanakan penyelenggaraan kegiatan SAS.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana disajikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara umum, penyelenggaraan pendidikan pada SMK RSBI di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah belum sesuai dengan standar penyelenggaraan SMK RSBI yang telah ditetapkan. Kelemahan-kelemahan yang masih dijumpai terutama berkaitan dengan pemenuhan indikator kinerja kunci tambahan (IKKT), yang meliputi semua aspek baik kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, kesiapan pendidik, kesiapan kepala sekolah, manajemen sekolah, ketersediaan sarana dan prasarana, pembiayaan, penyelenggaraan *teaching factory* dan *self access study*.
2. Kendala-kendala yang dialami oleh SMK RSBI dalam penyelenggaraan program pendidikan sesuai standar RSBI antara lain: (a) sekolah belum memperoleh akreditasi dari sekolah mitra yang bertaraf internasional; (b) sekolah belum mampu membangun jejaring internasional dengan sekolah mitra di luar negeri; (c) SKL tambahan yang disusun oleh sekolah belum memiliki acuan yang jelas; (d) kelemahan dalam proses pembelajaran sesuai dengan standar RSBI; (e) kelemahan dalam penilaian, yang belum menerapkan model dari salah satu sekolah yang bertaraf internasional; (f) persentase pendidik yang

berkualifikasi S2/S3 masih sangat rendah; (g) sebagian besar kepala sekolah belum berkualifikasi S2, dan kurang menguasai bahasa Inggris secara aktif; (h) belum diterapkannya TIK dalam manajemen sekolah; (i) keterbatasan sarana dan prasarana yang memenuhi dengan standar RSBI; dan (j) ketersediaan dana penyelenggaraan pendidikan yang kurang memadai dan dukungan pemerintah daerah yang lemah.

Daftar Pustaka

- Ali Akbar (2009). *Tingkat Kesiapan SMK di Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menuju Sekolah Bertaraf Internasional (SBI)*. Skripsi. Yogyakarta: FT-UNY.
- Depdiknas (2006). *Sistem Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) untuk Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. "Depdiknas Kembangkan *Teaching factory* di SMK." Diakses dari <http://disdik.jambiprov.go.id/informasi/lembaga-pendidikan/107.html>, tanggal 10 Juni 2009.
- Djemari Mardapi (2007). Sekolah Menengah Kejuruan Berstandar Internasional. *Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional "Kebijakan Pengembangan SMK dan Sertifikasi Guru SMK, tanggal 1 Desember 2007*.
- Joko Sutrisno (2007). Menuju SMK Bertaraf Internasional (SMK SBI). *Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional "Kebijakan*

Pengembangan SMK dan Sertifikasi Guru SMK, "tanggal 1 Desember 2007.

Kir Haryana (2007). *Konsep Sekolah Bertaraf Internasional*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Setjen Depdiknas.

Seamolec (2008). "Self Access Study. "Diakses dari <http://www.seamolec.org/pages.php?page=sas>, tanggal 10 Juni 2009.

SMKN 1 Kedungwuni. (2008). "*Teaching factory (TEFA)*. "Diakses tanggal 10 Juni 2010 dari http://www.smk1kedungwuni.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=22&lang=in.

Suharsimi Arikunto & Abdul Jabar (2009). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan. Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Tri Rijanto dkk. (2008). 'Good Practices Pada Penyelenggaraan SMK Bertaraf Internasional. "Diakses dari http://www.puslitjaknov.org/data/file/2008/makalah_peserta/16_Tri%20Rijanto_Best%20Practices%20SMK%20SBI.pdf, tanggal 3 Juni 2009.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Setjen Depdiknas

*Pencapaian Indikator IKKT pada Penyelenggaraan SMK RSBI di Daerah Istimewa
Yogyakarta (Amat Jaedun)*